

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan tetap menjadi tantangan pembangunan paling fundamental di tingkat global. Menurut World Bank, hamper 700 juta orang (8,5 persen dari populasi global) hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan penghasilan kurang dari \$2,15 perhari.² Kemiskinan sebagai permasalahan bersifat multidimensi terjadi disetiap negara termasuk di Indonesia yang tergolong tinggi tidak hanya pedesaan tetapi juga perkotaan di setiap provinsi. Persentase kemiskinan di pedesaan lebih tinggi mencapai 11,34 persen dibandingkan di perkotaan mencapai 6,66 persen.³ Ukuran kemiskinan dijadikan cerminan untuk menilai keberhasilan pembangunan aspek sosial dan ekonomi.⁴ Ketidakmerataan pembangunan dan kepemilikan sumber daya menyebabkan pendistribusian pendapatan tidak merata dan kesenjangan antar wilayah yang memperburuk kondisi ketimpangan dan memperdalam jurang kemiskinan. Terutama wilayah dengan kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang memiliki keterbatasan menjangkau akses layanan publik dan sifatnya mendesak yang semestinya dapat dirasakan masyarakat tanpa terkecuali, adil, inklusif dalam hal mengatasi kerentanan dan guncangan social.

Mengingat kondisi struktural dan heterogenitas provinsi beragam, merujuk pada data BPS, jumlah penduduk miskin bervariasi sebagian provinsi

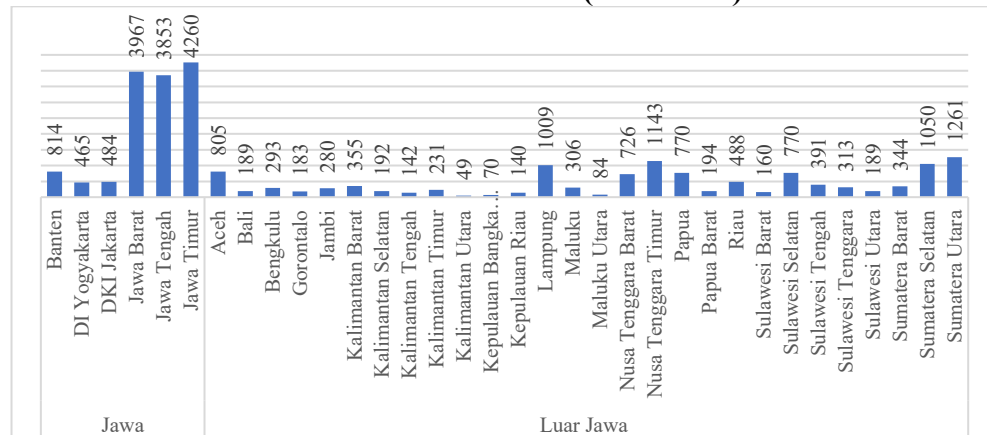
² World Bank Group, "Poverty, Prosperity, and Planet Report: Pathways Out of the Polycrisis" (Washington DC, 2024), 23.

³ BPS, "Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2024" (Jakarta, 2025), 4.

⁴ Laga Priseptian and Wiwin Priana Primandhana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan," *Forum Ekonomi* 24, no. 1 (2022): 45–53.

memiliki tingkat kemiskinan tinggi, berikut pemaparan rerata penduduk miskin:

Grafik 1. 1 Rata-Rata Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Tahun 2020 – 2024



Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Rata-rata kepadatan penduduk miskin di Indonesia dominan di Pulau Jawa terutama Jawa Timur mencapai 4.260 ribu jiwa, Jawa Barat mencapai 3.967 ribu jiwa dan Jawa Tengah mencapai 3.853 ribu jiwa. Sedangkan perkembangan kemiskinan secara nasional di tahun 2024 kemiskinan di Jawa mencapai 12.620 ribu jiwa dengan persentase 8,05 persen, meskipun jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara dan Bali 1.940 ribu jiwa, Maluku dan Papua 1.460 ribu jiwa rendah dibandingkan di Jawa tetapi persentase kemiskinan tergolong tinggi yaitu 12,15 persen untuk Bali dan Nusa Tenggara dan 18,62 persen untuk Papua dan Maluku.⁵ Kemiskinan yang tinggi akibat heterogenitas wilayah berbeda, struktural perekonomian dan kesenjangan wilayah serta kultural berbeda.⁶ Kondisi ini menunjukkan isu kemiskinan menjadi permasalahan nasional baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.

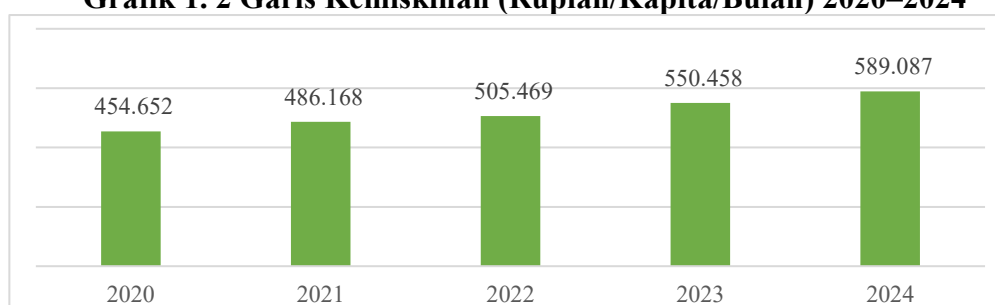
⁵ BPS, “Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2024.”

⁶ Endang Purwanti, “Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023,” *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 1–10.

Terjadinya Pandemi Covid-19 memperparah kemiskinan akibat pembatasan mobilitas, termasuk kondisi struktural dan heterogenitas provinsi yang beragam serta ketimpangan wilayah menjadi tantangan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tidak meratanya penduduk dan sentralisasi Jawa sebagai provinsi yang menjadi kawasan pusat industri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁷ Tingkat kemiskinan nasional meningkat dipicu oleh kenaikan harga bahan pokok dan BBM selama tahun 2015-2020, termasuk pembatasan mobilitas penduduk di tahun 2020.⁸ Kondisi kemiskinan diperparah terjadinya ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan rentetan permasalahan meningkatnya biaya hidup, pendapatan tidak menentu, kematian, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan berdampak pada kesejahteraan.⁹

Kemudian, BPS merepresentasikan batas kemiskinan pengeluaran minimum (rupiah) setara 2100 kilokalori kebutuhan pokok makanan dan kebutuhan non makanan.¹⁰ Peningkatan garis kemiskinan dampak dari kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi setiap tahun. Sebagai berikut:

Grafik 1. 2 Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) 2020–2024



Sumber: Data diolah peneliti, 2026

⁷ Yuwarman Mansur, “Analisis Perkembangan Penduduk Miskin , Karakteristik Kemiskinan Dan Kedalaman Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA* 8, no. 1 (2024): 18–31.

⁸ BPS, “Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2024.”

⁹ Affandi et al., “Interplay between Poverty, Poverty Eradication and Sustainable Development: A Semi-Systematic Literature Review,” *Global Transitions* 7 (2025): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.glt.2024.11.001>.

¹⁰ BPS, “Garis Kemiskinan,” Badan Pusat Statistik, 2026.

Secara nasional, selama tahun 2020-2024 garis kemiskinan mengalami kenaikan mencapai Rp589.087 perbulan.¹¹ Sedangkan pada tingkat provinsi, di Jawa Timur garis kemiskinan sebesar Rp547.751 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 3.893,82 ribu jiwa, Jawa Barat dengan garis kemiskinan sebesar Rp535.509 dibandingkan Provinsi lain seperti Papua Barat jumlah penduduk miskin mencapai 108,28 ribu jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp816.613, Kepulauan Bangka Belitung jumlah penduduk miskin mencapai 78,58 ribu jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp917.673.¹² Hal ini menunjukkan masih banyaknya penduduk memiliki pengeluaran perbulan dibawah garis kemiskinan. Mengindikasikan secara struktural dan absolute (pendapatan) rendah dan pendistribusian pendapatan tidak merata menjadi pembatasan akses dasar masyarakat untuk mencukupi kebutuhan harian.

Di Indonesia tercermin melalui dampak ketidakmerataan pembangunan, pendidikan rendah, sumber daya alam yang belum terkelola, upah rendah, pengangguran serta pendistribusian pendapatan yang tidak merata di setiap provinsi. Selaras dengan Amartya Sen, kemiskinan sebagai ketidaksetaraan antara kelompok miskin dan anggota komunitas lainnya serta kesulitan mencukupi kebutuhan standar.¹³ Dalam jangka panjang ketidaksetaraan menjadi ancaman pembangunan sosial berdampak terhambatnya pengentasan kemiskinan dan memicu permasalahan seperti tindak kejahatan, kesehatan dan

¹¹ BPS, "Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Provinsi Dan Daerah," Badan Pusat Statistik, 2025.

¹² BPS, "Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2024," Badan Pusat Statistik, 2025.

¹³ Amartya Sen, *Poverty and Famines An Essay on Entitlement and Deprivation* (Netherlands: Oxford University Press, 1981), 22–23.

kerusakan lingkungan.¹⁴ Selain itu, peran pemerintah sebagai fasilitator menyediakan pembiayaan melalui perbankan, lapangan kerja, subsidi, bantuan langsung tunai, akses dasar serta pemberdayaan.¹⁵ Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan anggaran, pembangunan infrastruktur, menyediakan layanan publik, serta kebijakan pemerataan dan mendistribusikan pendapatan secara merata

Meskipun tingkat kemiskinan tinggi tetapi selama 2020–2024 cenderung mengalami penurunan sebagai indikasi pulihnya kondisi perekonomian. Tren kemiskinan BPS, cenderung menurun baik jumlah maupun persentase dengan penurunan 1,63 persen (3.49 ribu jiwa) selama tahun 2020-2024.¹⁶ Menurut BPS,¹⁷ dan World Bank,¹⁸ Kemiskinan menurun seiring berkurangnya tingkat ketimpangan. Mengacu pada konteks ini, pengentasan kemiskinan diperlukan upaya meningkatkan pemerataan dan pengurangan kesenjangan serta inklusif melalui pendistribusian kekayaan secara adil baik melalui sinergi dan penggalan potensi *Islamic Social Finance*, alokasi dana fiskal termasuk kondisi perekonomian dengan menargetkan masyarakat miskin.

Potensi *Islamic Sosial finance* terutama Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) diamanatkan mewujudkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan, oleh BAZNAS diimplementasikan pelayanan preventif dasar pemenuhan masyarakat dan menjawab tantangan sosial ekonomi.¹⁹ Zakat memiliki dampak

¹⁴ United Nations, “Goal 10: Reduce Inequality within and among Countries,” United Nations, 2025.

¹⁵ Yesi Triani, Maya Panorama dan Rinol Sumantri, "Analisis Pengetasan Kemsikinan di Kota Padang", *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 2020, hlm. 173-176.

¹⁶ BPS, “Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2024.”

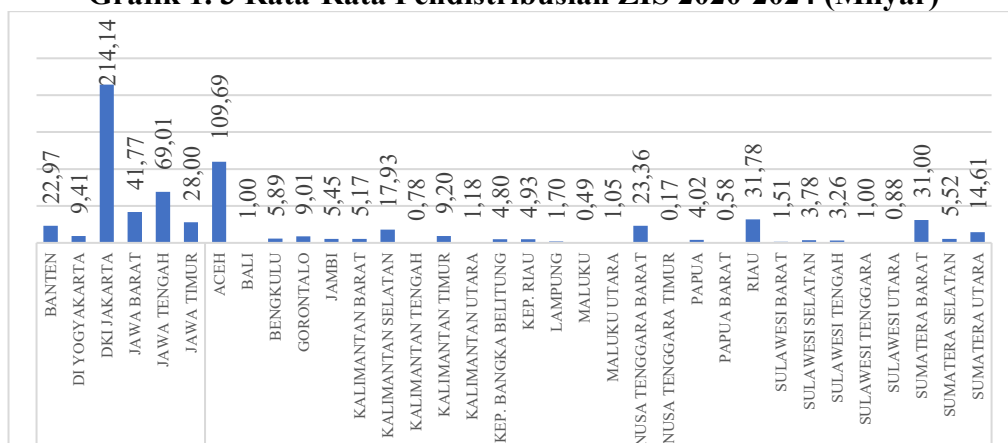
¹⁷ BPS, “Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun,” Badan Pusat Statistik, 2025.

¹⁸ Katy Bergstrom, “The Role of Inequality for Poverty Reduction” (Washington DC: World Bank, 2020), <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9409>.

¹⁹ Badan Amil Zakat Nasional, “Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2023” (Jakarta, 2024).

dan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan terutama optimalisasi zakat produktif.²⁰ Pemberdayaan dan pengalokasian ZIS secara produktif mampu meningkatkan perekonomian dan pengurangan tingkat kemiskinan mustahik.²¹ Berikut pendistribusian ZIS secara agregat:

Grafik 1. 3 Rata-Rata Pendistribusian ZIS 2020-2024 (Milyar)



Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Realisasi rerata distribusi zakat, infak dan sedekah (ZIS) di wilayah Jawa didominasi oleh wilayah DKI Jakarta mencapai Rp214,14 Miliar, dan Jawa Tengah Rp 69,01 Miliar.²² Kemudian untuk wilayah luar jawa provinsi yang mendominasi berada di wilayah Aceh yang mencapai 109,69 Miliar. Populasi umat muslim yang besar dan literasi yang baik mampu memberikan kontribusi dalam penghimpunan hingga pendistribusian zakat, infak dan sedekah. Mengacu laporan zakat nasional 2024, distribusi zakat mampu menurunkan kemiskinan sebesar 74 persen, Papua sebesar 67 persen dan DKI Jakarta 64

²⁰ Mohd Suffian, Mohamed Esa, and Hairunnizam Wahid, "Asnaf Development Outcome : A Systematic Literature Review and Logic Model Development," *SAGE Open*, no. September (2025): 1–20, <https://doi.org/10.1177/21582440251357982>.

²¹ Sri Herianingrum et al., "Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 4 (2024): 643–60, <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>.

²² Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2023."

persen sedangkan di provinsi lain cukup rendah berkisar 45-60 persen terutama Maluku Utara 0 persen, Kalimantan Barat 27 persen, Papua Barat 33 persen serta Sumatra Utara dan Kalimantan Tengah 37 Persen. Namun, zakat berkontribusi relatif rendah mengatasi kemiskinan dan belum sebanding dengan skala permasalahan secara nasional.²³

Meskipun, populasi umat muslim yang besar terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah tidak menjamin pengumpulan dan pendistribusian mampu mengatasi permasalahan kemiskinan secara optimal. ZIS menyimpan potensi besar sebagai mekanisme redistribusi pendapatan, dan inklusi sosial menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tidak terakomodasi kebijakan fiskal konvensional. Bahkan potensi maksimal dari zakat diperkirakan mencapai Rp 327 Triliun.²⁴ Namun, mekanisme yang tidak transparan, ketidakmerataan distribusi, rendahnya kesadaran masyarakat menghambat efektifitas distribusi zakat.²⁵ Efektifitas pengelolaan zakat dipengaruhi tingkat kebijakan dan sinergi baik pemerintah maupun lembaga zakat.²⁶ Serta membutuhkan upaya keberlanjutan dari pihak dalam partisipasi aktif mencapai kesejahteraan nasional.²⁷

²³ Baznas, "Laporan Zakat Dan Pengetasan Kemiskinan Nasional" (Jakarta, 2025).

²⁴ Siti Rahmah, "Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat , Infak , Sedekah , Dan Wakaf (ZISWAF) Di Indonesia : Studi Kepustakaan Terhadap Peluang Dan Tantangan" 1, no. 2 (2025): 102–18, <https://doi.org/10.61169/ghanimah>.

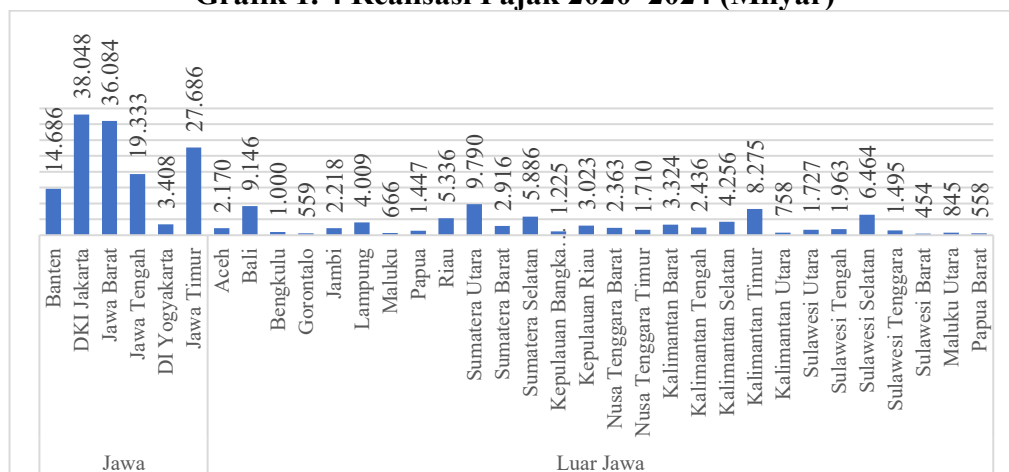
²⁵ Azrai Harahap, M Guffar Harahap, and Alkausar Saragih, "Distribution of Zakat towards Poverty Alleviation," *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 635–44.

²⁶ Fatimatuz Zahro and Mashudi, "The Influence of Zakat on Education and Health as a Mediating Variable for Poverty Alleviation in Bangkalan Society," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 11, no. 1 (2025): 47–60, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v11i1.30165>.

²⁷ Putri Haezah Fahriah, Ali Idrus, and Rini Fatma Kartika, "The Role of BAZNAS RI in Supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) Agenda in the Environmental Development Pillar," in *7th INDONESIAN CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS* (DKI Jakarta: BAZNAS Indonesia, 2023), 7th%0AINDONESIAN CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS.

Disamping zakat sebagai instrumen *Islamic Social Finance*, kebijakan fiskal berperan krusial mencapai kesejahteraan melalui pemerataan pendistribusian, menciptakan kehidupan layak dan pemerataan pembangunan setiap wilayah. Pajak direalisasikan menciptakan pembangunan inklusif mencapai kesejahteraan dengan indikator kemiskinan. Redistribusi fiskal sebagai indikator mengukur standar hidup melalui pengeluaran dan perpajakan.²⁸ Pemecahan masalah kemiskinan secara langsung mencukupi kebutuhan dasar (*Basic needs*).²⁹ Berikut realisasi pendistribusian pajak:

Grafik 1. 4 Realisasi Pajak 2020–2024 (Milyar)



Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Realisasi Pajak di tingkat provinsi didominasi sebagian besar di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Perbedaan infrastruktur dan sarana prasarana serta potensi wilayah menyebabkan terjadinya kesenjangan luar Pulau Jawa belum

²⁸ Nora Lustig and Valentina Martinez-pabon, “Fiscal Policy , Income Redistribution , and Poverty Reduction in Latin America,” *Oxford Open Economics* 4, no. Edisi Suplemen (2025): 426–46, <https://doi.org/10.1093/ooec/odae034>.

²⁹ Eni Susilowati, *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Pradina Pustaka, 2022).

terkelola maksimal.³⁰ Namun, tingginya pajak disebagian wilayah belum tentu diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan seperti di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan potensi pajak yang tinggi begitupun tingkat kemiskinan tergolong tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ini mengindikasikan provinsi tersebut terdapat aktivitas perekonomian besar tetapi tidak otomatis menciptakan *trickle-down effect* atas realiasi pajak. Penerapan kebijakan tidak optimal, tidak tepat sasaran program dan alokasi anggaran berdampak distribusi tidak merata dan kesejahteraan masyarakat.³¹ Kapasitas dan kemandirian ekonomi mempengaruhi pengelolaan wilayah serta inefisiensi dapat mengurangi dampak pajak terhadap kemiskinan.

Disisi lain, kepatuhan dan efisiensi fiskal terwujud melalui penguatan administrasi perpajakan dengan menyelaraskan keberlanjutan fiskal dalam pengentasan kemiskinan secara inklusif serta stabilitas perekonomian.³² Realisasi fiskal tidak hanya berupa redistribusi pajak tetapi belanja pemerintah melalui alokasi bantuan sosial penanganan masyarakat rentan. Mengacu peraturan Menteri Sosial RI No. 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial. Pasal 1 ayat 1 bahwa bantuan sosial bentuk perlindungan atau *safety net* dan meningkatkan taraf hidup berupa bantuan tunai maupun non-

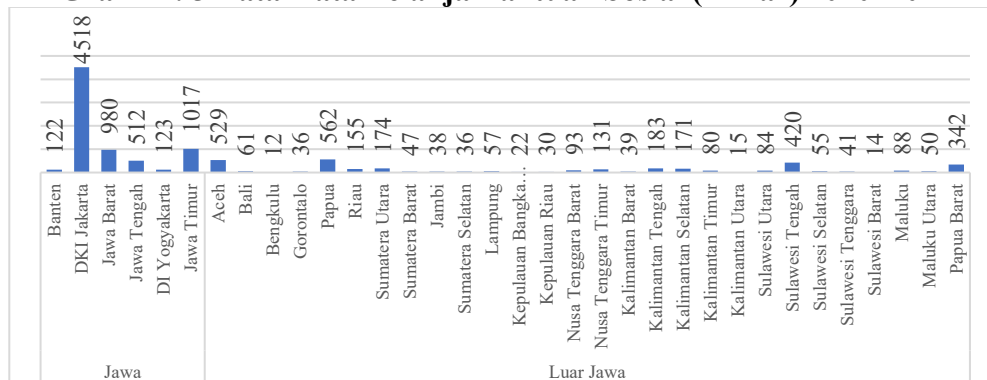
³⁰ Hasna Imtiyaz Hanifah and Agus Sunarya Sulaeman, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah: Studi Empiris Atas Korelasi Resiprokal," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2022): 146–72.

³¹ Mahada, Sitti Haliza.P, and Rusli, *Pengantar Ekonomi Pembangunan Dinamika Ekonomi Dan Inovasi Berkelanjutan*, ed. Mu'fidatul Nurul Hajjad (Padang: CV GET PRESS INDONESIA, 2025), 188.

³² Astri Warih Anjarwi, "Tax Burden and Poverty in Lower-Middle-Income Countries : The Moderating Role of Fiscal Freedom," *Development Studies Research* 12, no. 1 (2025): 2466511, <https://doi.org/10.1080/21665095.2025.2466511>.

tunai.³³ Transfer sosial mencakup bantuan sosial berdampak pengurangan kemiskinan dan setengahnya.³⁴ Berikut distribusi bantuan sosial:

Grafik 1. 5 Rata-Rata Belanja Bantuan Sosial (Miliar) 2020–2024



Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Merujuk data tersebut realisasi bantuan sosial secara nasional bantuan sosial tiap provinsi beragam dominan di provinsi DKI Jakarta mencapai Rp4,5 triliun, menunjukkan ketimpangan dan ketidakmerataan disebagian provinsi terutama di Bengkulu, Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan. Namun, bantuan sosial di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah meskipun cukup tinggi dibandingkan luar Jawa tetapi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa cenderung tergolong tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Mengidikasikan bantuan sosial di sebagian Pulau Jawa belum tentu efektif mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, realitasnya bantuan sosial menyebabkan ketergantungan, perlu mengimbangi melalui pemberdayaan, pendampingan usaha, inklusi keuangan, subsidi usaha, pelatihan, serta modal usaha.³⁵

³³ Fahriah, Idrus, and Kartika, “The Role of BAZNAS RI in Supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) Agenda in the Environmental Development Pillar.”

³⁴ Raziye Selim and Suat Küçükçifçi, “The Effect of Social Transfers on Income Inequality and Poverty in Türkiye,” *Journal of the Knowledge Economy* 16 (2025): 8198–8220, <https://doi.org/10.1007/s13132-024-02196-1>.

³⁵ Rohani Budi Prihatin, “Fenomena Ketergantungan Terhadap Bantuan Sosial” (Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI FENOMENA, 2024).

Optimalisasi bantuan sosial melalui program pengamanan sosial dengan kriteria ketepatan, target kelompok rentan dan miskin, serta berpenghasilan rendah didukung pengawasan.³⁶ Meningkatkan dampak bantuan sosial diperlukan peningkatan pengawasan, pemutakhiran data penerima, pengawasan serta integrasi dengan program pemberdayaan.³⁷ Meskipun demikian, alokasi instrumen fiskal pengentasan kemiskinan seperti pajak dan bantuan sosial bentuk redistribusi pelayanan pemerintah terhadap pembangunan dan penanganan kemiskinan berkorelasi kuat pembangunan ekonomi.³⁸ Sehingga, diperlukan evaluasi lanjutan bantuan sosial dan pajak meningkatkan optimalisasi bukan sekedar meningkatkan konsumsi jangka pendek tetapi berorientasi perbaikan kualitas masyarakat jangka panjang.

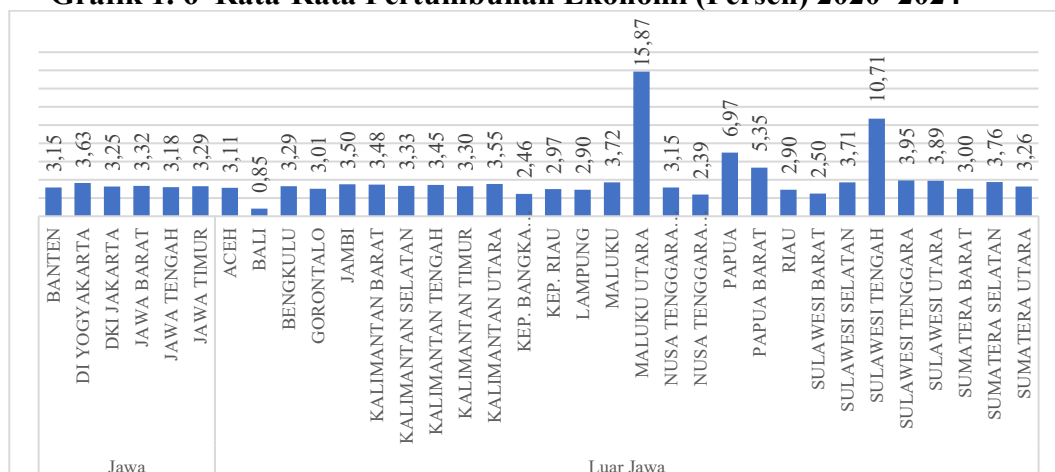
Kemudian, indikator kondisi sosial ekonomi masyarakat merujuk pada pertumbuhan ekonomi secara linier diharapkan mendorong terciptanya kesejahteraan terwujud melalui menurunnya kemiskinan dan kesenjangan, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong transformasi struktural atas produktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat peningkatan perekonomian atas kegiatan produksi barang dan jasa, penambahan pendapatan perkapita dan nasional menjadi gambaran kesejahteraan masyarakat.³⁹ Berikut rerata pertumbuhan di 34 provinsi Indonesia:

³⁶ Martha Carolina and Mutiara Shinta Andini, “Tantangan Bantuan Sosial Sebagai Bagian Extraordinary Policy Responses Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional” (Jakarta, 2021).

³⁷ Dita Mayreista, Eka Nurwahyuliningsih, and Mutiara Rizki, “Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kecamatan Benakat Kabupaten Muaraenim,” *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 7, no. 1 (2025): 59–71.

³⁸ Shahinul Islam et al., “The Role of Fiscal Policy in Economic Growth : A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries,” *IJRISS* VIII, no. 2454 (2025): 1361–71, <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.

³⁹ Achmad Daengs GS, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi Implementasi Investasi Dalam Menyelaraskan Pembangunan Perekonomian Jawa Timur* (Surabaya: Unitomo Press, 2021), 162–65.

Grafik 1. 6 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2020–2024

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Selama periode 2020-2024 rerata pertumbuhan sebagian besar provinsi berkisar 3 persen dengan terendah di provinsi Bali 0,85 persen. Wilayah luar jawa khususnya di bagian timur Indonesia menampilkan pertumbuhan yang volatil dan ekspansif terutama Maluku Utara 15,87 persen, Sulawesi Tengah 10,71 persen. Tingginya angka pertumbuhan ini dipicu oleh akselerasi sektor komoditas dan hilirisasi tambang yang padat modal.⁴⁰ Pertumbuhan ekonomi yang beragam antar wilayah menjadi indikasi adanya disparitas wilayah cerminan kapasitas dan kemampuan atas produktivitas mendayagunakan potensi sumberdaya untuk tujuan kesejahteraan.

Meskipun pertumbuhan dijadikan tolak ukur kondisi perekonomian, tetapi sering kali pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan ketimpangan, kemiskinan maupun perbaikan lingkungan.⁴¹ Kemiskinan multidimensi menurun sebesar 4-5 persen atas kenaikan PDB sebesar 10 persen

⁴⁰ Fauzan Akhmadi, “Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *HATTA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 2, no. April (2024).

⁴¹ M F Firmansyah, *Kebijakan Ekonomi Dalam Pembangunan Wilayah: Strategi Dan Implikasi Inovasi Kebijakan Publik Multidisiplin* (Bogor: Guepedia, 2022), 13.

yang menunjukkan pengaruh rendah.⁴² Pengurangan kemiskinan dampak pertumbuhan ekonomi gagal apabila rendahnya keterkaitan ekonomi dengan aktivitas orang miskin, serta penyebaran aktivitas ekonomi tidak terintegrasi dan inklusif program kemiskinan.⁴³ Sehingga diperlukan pertumbuhan ekonomi inklusif memastikan dampak pertumbuhan ekonomi berorientasi pada masyarakat rentan diwujudkan pemerataan ekonomi, keadilan distribusi, penyerapan tenaga kerja, rendahnya kemiskinan antar wilayah serta sinergi kebijakan sosial dan fiskal mendorong optimalisasi jaringan pengaman termasuk penyediaan akses dasar dalam jangka panjang.

Paradigma pembangunan tidak sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga mendukung perubahan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan, kesenjangan, struktural sebagai peningkatkan kesejahteraan. Peranan Indeks Pembangunan Manusia sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia.⁴⁴ IPM indikator mengacu aspek perubahan pembangunan ekonomi.⁴⁵ Selain itu, IPM acuan tingkat kesejahteraan lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi mencakup ukuran ekonomi, pendidikan dan kesehatan.⁴⁶ Berikut rata-rata IPM 34 provinsi Indonesia:

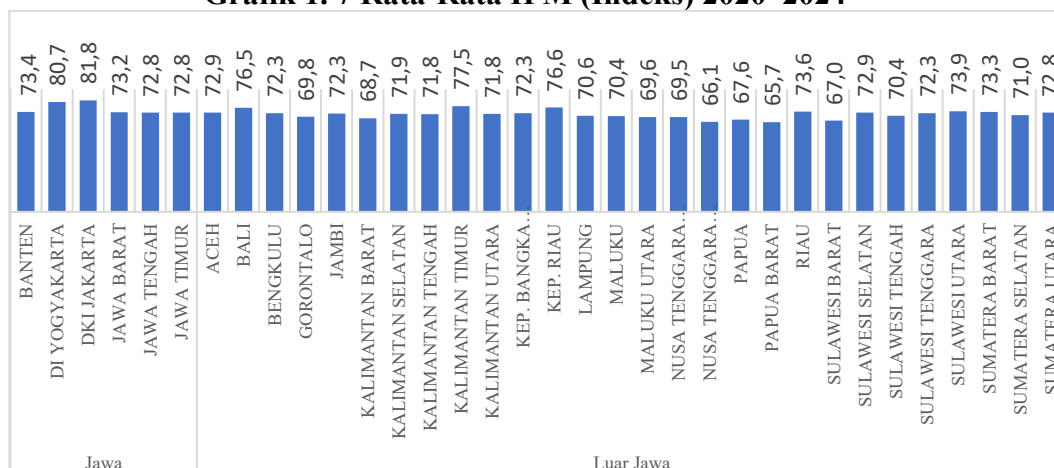
⁴² P Balasubramanian, F Burchi, and D Malerba, "Does Economic Growth Reduce Multidimensional Poverty? Evidence from Low- and Middle-Income Countries," *World Development* 161 (2023): 106119, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106119>.

⁴³ Paddy Carter et al., "When Growth Does – and Does Not – Reduce Poverty" (London: British International Investment, 2024).

⁴⁴ Darwin Lie et al., *Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi*, ed. Safrinal, 1st ed. (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2022).

⁴⁵ Firmansyah, *Kebijakan Ekonomi Dalam Pembangunan Wilayah: Strategi Dan Implikasi Inovasi Kebijakan Publik Multidisiplin*.

⁴⁶ GS, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi Implementasi Investasi Dalam Menyelaraskan Pembangunan Perekonomian Jawa Timur*.

Grafik 1. 7 Rata-Rata IPM (Indeks) 2020–2024

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Mengacu rerata tersebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tiap provinsi beragam berkisar 65-80 yang menunjukkan disparitas antar provinsi yang isu pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan ditahun 2024 IPM secara nasional berkisar 75,02 yang meningkat 0,63 poin dari tahun 2023 dengan tertinggi yaitu DKI Jakarta 84,14 dan Yogyakarta 81,61, IPM dikategorikan tinggi rentang 70-80 terdiri dari 30 provinsi dengan peningkatan IPM sedang menjadi tinggi yaitu Sulawesi Barat, IPM dikategorikan tinggi rentang 60 terdiri 5 provinsi dengan peningkatan IPM rendah menjadi sedang yaitu Papua tengah.⁴⁷ Sedangkan mengacu UNDP, Indonesia posisi ke 113 dengan indeks HDI 0,728 dikategorikan *High human development* 2023.⁴⁸

Pengentasan kemiskinan salah satu isu dan prioritas utama agenda pembangunan global dalam kerangka Sustainable Development Goals khususnya pada tujuan SDGs 1 yaitu *No Poverty*. Kemiskinan bukan hanya persoalan kekurangan pendapatan, tetapi mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu,

⁴⁷ BPS, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024” (Jakarta, 2024).

⁴⁸ UNDP, “Human Development Index (HDI),” Human Development Report, 2026.

upaya pengurangan kemiskinan menuntut pendekatan pembangunan komprehensif, terintegrasi dan berorientasi peningkatan kualitas manusia. Pengentasan Kemiskinan menjadi tujuan pertama dalam kerangka ini. Kemiskinan terjadi dikarenakan ketimpangan dan ketidakadilan terjadi di Masyarakat. Diperlukan pembangunan berorientasi dan memihak masyarakat rentan. Serta mengingat Indonesia sebagai wilayah berkepulauaan dapat menjadi sebab terjadinya ketimpangan dan kemiskinan disebagian wilayah.

Mengacu teori *retribution with growth* bahwa pertumbuhan ekonomi diiringi redistribusi pendapatan berorientasi proyek pembangunan mendorong pemerataan dan kesempatan kerja.⁴⁹ Dengan adanya pendistribusian zakat, redistribusi fiskal melalui pajak dan bantuan sosial dapat dijadikan strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil yang dapat meningkatkan efektifitas pertumbuhan ekonomi mendorong pengentasan kemiskinan. Selaras Fajrin Intan Safitri dkk,⁵⁰ dan Dwi Mauli dkk,⁵¹ Zakat dan pajak berperan strategis peranannya saling melengkapi mewujudkan stabilitas ekonomi dan mengatasi ketimpangan. Serta studi Shahinul Islam dkk, pajak dan bantuan sosial berkorelasi kuat mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.⁵² Kondisi ini mengasumsikan kenaikan pendistribusian zakat,

⁴⁹ Syed Agung Afandi, Muslim Afandi, and Rizki Erdayani, *Pengantar Teori Pembangunan* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Teori_Pembangunan/fBOtEAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

⁵⁰ Fajrin Intan Safitri et al., "Synergy of Zakat and Taxes Viewed from Fiscal Policy Objectives," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. May (2024): 269–78, <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i4.11667>.

⁵¹ Arnes Rapindo et al., "Perbandingan Efektivitas Zakat Dan Pajak Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Indonesia," *Journal Of Economis and Business* 2, no. 2 (2025): 161–70.

⁵² Islam et al., "The Role of Fiscal Policy in Economic Growth : A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries."

realisasi pajak dan bantuan sosial mampu mendorong perbaikan kualitas pemerataan pada penanganan kemiskinan.

Kemudian pertumbuhan endogen, menekankan investasi dalam mendorong perbaikan kualitas manusia melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan jaminan kesehatan sebagai kunci utama penggerak terpenting pembangunan ekonomi berkelanjutan. Indeks pembangunan manusia indikator keberhasilan pembangunan nasional.⁵³ Studi Zulfikar Hasan⁵⁴ dan Ni Komang dkk⁵⁵, pertumbuhan ekonomi dan Indeks pembangunan manusia berkorelasi pada kemiskinan. Dengan demikian kenaikan pendistribusian zakat, pajak dan bantuan sosial berdampak pemerataan didukung stabilitas ekonomi berperan krusial dalam mengatasi permasalahan isu sosial ekonomi mendorong tranformasi perbaikan kualitas sumberdaya manusia yang dapat disinergikan mendorong terciptanya kesejahteraan yang teraktualisasi dalam pemerataan sekaligus pengentasan kemiskinan.

Keseluruhan data secara statistik menunjukkan seiring kenaikan laju pendistribusian ZIS, pajak dan bantuan sosial serta pertumbuhan secara linier mendorong penurunan kemiskinan. Namun, terdapat beberapa provinsi menunjukkan kondisi sebaliknya kenaikan tidak disertai dengan penurunan angka kemiskinan. Secara teoritis kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian, seperti jumlah penduduk miskin yang mengalami kenaikan di Kalimantan

⁵³ A. Nur Asri Ainun et al., *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 10–11.

⁵⁴ zulfikar Hasan, “The Effect Of Economic Growth And Human Development Index On Poverty In Indonesia,” *Journal of Economics and Sustainability (JES)*, 3, no. 1 (2021): 42–53.

⁵⁵ Ni Komang et al., “Does Human Development Index (HDI), Investment , and Unemployment Effects on Economic Growth and Poverty Levels ? (A Case Study in Bali),” *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 5, no. 2 (2021): 416–26.

Tengah mencapai 3,7 persen dari 142 ribu jiwa menjadi 147 ribu jiwa dengan selisih kenaikan 5.265 jiwa dari tahun 2023 dan Kep. Bangka Belitung jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 8,12% dari 68,69 ribu jiwa menjadi 74,26 ribu jiwa selisih kenaikan 5.575 jiwa dari tahun 2023.

Tetapi kondisi secara statistik pendistribusian ZIS pada tahun 2024 di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan mencapai 511% dari Rp430.508.108 menjadi Rp2.629.600.000 dengan selisih kenaikan Rp2.199.091.824 dari tahun 2023. Kemudian, realisasi pajak dua provinsi mengalami kenaikan yaitu Kep. Bangka Belitung meningkat sebesar 1% dari Rp1.247,30 miliar menjadi 1.259,35 miliar dengan selisih Rp 12 miliar dan Kalimantan Tengah meningkat sebesar 7% dari Rp2.823 miliar menjadi Rp3.027 Miliar dengan selisih Rp203 Miliar dari tahun 2023. Kemudian realisasi bantuan sosial di Kalimantan Tengah meningkat mencapai 427% dari Rp89,45 miliar menjadi 471,5 miliar dengan selisih Rp382 Miliar dari tahun 2023. Begitupun Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah meningkat sekitar 4,46% dari 4,14% dengan selisih 0,32% dari tahun 2023.

Kondisi ini mengindikasikan realisasi baik pendistribusian dan bantuan belum cukup kuat dalam mendorong pengurangan kemiskinan disebagian provinsi secara berkelanjutan berkelanjutan, termasuk alokasi tidak tepat sasaran serta struktur pembangunan tidak merata tercermin dari kemiskinan yang meningkat. Termasuk kondisi makro ekonomi yang tidak stabil seperti ketimpangan, inflasi yang mengakibatkan penyerapan tidak maksimal. Hal ini terjadi apabila pertumbuhan ekonomi hanya sebatas kenaikan angka PDB mengabaikan isu kemiskinan, pengangguran dan ketidaksetaraan serta

distribusi ZIS yang tidak efisien.⁵⁶ Begitupun pajak, cenderung terserap untuk alokasi kegiatan belanja rutin dibandingkan belanja produktif yang rendah.⁵⁷ Termasuk kurang efektifnya bantuan sosial akibat inkonsisten kebijakan, koordinasi dan transparansi yang rendah.⁵⁸

Di sisi lain, mengacu pada data secara statistik menunjukkan ada beberapa kondisi sebaliknya bahwa penurunan pendistribusian ZIS, pajak, bantuan sosial, dan pertumbuhan ekonomi tetapi diiringi dengan penurunan kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan dampak dari setiap variabel antar wilayah yang beragam akibat adanya faktor kondisi perekonomian wilayah, kebijakan dan regulasi termasuk karakteristik penduduk. Berakibat pada hambatan dalam pengentasan kemiskinan secara inklusif. Selain itu juga, penurunan kemiskinan bukan sekedar akibat pengaruh intensitas distribusi ZIS, pajak, bantuan sosial, dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga diperlukan penekanan efektifitas distribusi dan ketepatan sasaran terutama dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam artian diperlukan dukungan perbaikan modal manusia. Oleh sebab demikian, terdapat celah untuk diteliti dan identifikasi secara komprehensif lebih lanjut konteks kemiskinan.

Sehingga diperlukan optimalisasi tata kelola dan sinergi *Islamic Social Finance*, instrumen fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara inklusif berkontribusi dalam perbaikan kualitas sumberdaya manusia (IPM) untuk

⁵⁶ M Nanang Febrianto et al., "The Impact of Zakat and Macroeconomics on Poverty in Indonesia : A Panel Data Analysis of 34 Provinces," *International Journal of Islamic Economics* 7, no. 2 (2025): 135–51.

⁵⁷ Shandy Jannifer Matitaputty et al., "Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pendahuluan," *Perspektif Akuntans* X, no. Agustus (2020): 253–68.

⁵⁸ Gracenda Febina et al., "Peran Program Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi Dari Berbagai Penelitian," *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 4, no. 1 (2025): 108–17.

meningkatkan dampak pengentasan kemiskinan selaras teori redistribution with growth dan pertumbuhan endogen. Peranan penting intervensi pembangunan manusia sebagai penekanan sasaran utama dalam pembangunan tidak sekedar diukur aspek ekonomi tetapi kesejahteraan, kualitas hidup, kesempatan dan kebebasan mencapai potensi tiap individu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur dalam penilaian kemajuan pembangunan.⁵⁹ Tingginya IPM berkorelasi dengan produktivitas berdampak pada peningkatan output.⁶⁰

Kondisi empiris menunjukkan bahwa berbagai instrumen tersebut belum selalu efektif karena manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh Masyarakat miskin. Oleh karena itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga menjadi mekanisme yang menjembatani pengaruh instrumen redistribusi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan penelitian dengan studi sebelumnya yang inkonsisten dengan hasil temuan penelitian atas pengaruh pendistribusian ZIS, pajak, bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Serta terbatasnya penelitian yang mengkaji peran intervensi pembangunan manusia (IPM) menjembatani dalam pengentasan kemiskinan di provinsi Indonesia secara komprehensif.

Selain itu, kebaruan penelitian terletak pada metode dengan pendekatan path analysis untuk mengeksplorasi pengaruh secara langsung dan tidak langsung atas pengaruh pendistribusian ZIS, pajak, bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta peran IPM terhadap kemiskinan termasuk

⁵⁹ Muntaha Mardhatillah et al., *Administrasi Pembangunan* (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), 27.

⁶⁰ Liliana Handayani, "Analysis of The Influence of The Unemployment Rate and HDI on Poverty Levels in Province of Central Java," *Journal of Economic Education* 12, no. 1 (2023): 125–32.

pengujian MGA (Multigroup Analyse) untuk mengeksplorasi lebih lanjut terdapat atau tidaknya pengaruh di Pulau Jawa dan Luar Jawa atas disparitas wilayah beragam mengacu pada 38 provinsi di Indonesia sebagai populasi, yang diwakilkan 34 provinsi sebagai sampel dengan kriteria eksklusi pertimbangan ketersediaan *data series* yang terbatas di 4 provinsi pemekaran. Serta peneliti mengklasifikasikan ruang lingkup pulau jawa dan luar jawa dikarenakan memiliki perbedaan kondisi geografis, keuangan, sektor unggulan, infrastruktur dan pemerintahan antar wilayah provinsi. Meskipun terdapat studi yang relevan, namun penelitian ini menawarkan instrumen *Islamic social finance*, instrumen fiskal, pertumbuhan ekonomi sebagai prediktor dan IPM sebagai intervening dikaji dengan komprehensif mengacu pada Indonesia di Indonesia.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pada tahapan identifikasi mencakup masalah apa saja yang muncul pada latar belakang penelitian, diantaranya:

- a. Kemiskinan terjadi akibat pendistribusian pendapatan tidak merata yang menyebabkan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi serta kemiskinan dapat menyebabkan masalah multidimensi seperti sosial budaya, kehidupan, ekonomi, teknologi. Selain itu, kemiskinan dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Permasalahan pembangunan tidak merata sebagai penyebab kemiskinan masih tinggi di Indonesia meskipun berdasarkan data BPS tahun 2020-2024 persentase kemiskinan cenderung menurun setiap tahunnya tetapi garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

- b. Ketimpangan pendistribusian ZIS antar wilayah memiliki perbedaan yang dapat menjadi tantangan pengentasan kemiskinan di setiap provinsi Indonesia yang tidak merata. Potensi ZIS yang besar sebaiknya dialokasikan secara merata dibutuhkan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan hadirnya instrumen *Islamic social finance*.
- c. Penerimaan pajak dalam perekonomian memiliki fungsi sebagai stabilitas, redistribusi dan anggaran. Pajak sebagai sumber penerimaan negara dapat dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan melalui redistribusi pendapatan. Namun apabila dalam redistribusi pendapatan tidak berjalan dengan baik dan tidak merata, dapat meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin, begitu juga dalam pemungutan pajak tidak tepat sasaran dapat menyebabkan ketidakadilan dan meningkatkan beban masyarakat miskin.
- d. Pada realitasnya bantuan sosial dapat menyebabkan ketergantungan, oleh sebab itu perlu adanya sistematisasi program strategis melalui kegiatan pemberdayaan dalam bentuk pendampingan usaha, inklusi keuangan, subsidi usaha, pelatihan, serta modal usaha. Optimalisasi bantuan sosial melalui program pengaman sosial dengan kriteria ketepatan waktu, target kelompok rentan dan berdampak, mengikuti kondisi ekonomi, kemudian menyasar masyarakat miskin dengan menetapkan target subsidi, fokus masyarakat berpenghasilan rendah serta pengawasan.
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berasal dari aktivitas pada perekonomian pada negara dalam memproduksi barang dan jasa.

Dengan adanya pertumbuhan yang tinggi di Indonesia diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab demikian, pertumbuhan ekonomi indikator mengurangi kemiskinan harus merata penyebarannya ke sektor produktif dan padat karya sehingga memberikan dampak melalui penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.

- f. Kesenjangan pembangunan di Indonesia menunjukkan kualitas hidup, Pendidikan dan Kesehatan yang tidak merata. Diperlukan sinergi berbagai pihak agar dapat memperbaiki kualitas SDM di daerah provinsi-provinsi melalui penyediaan akses dasar Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan yang layak secara merata.

2. Batasan Masalah

Sedangkan batasan permasalahan ditetapkan supaya penelitian lebih fokus dan tidak menyeleweng serta tidak meluas. Adapun batasan penelitian dengan ruang lingkup, berikut:

- a. Objek penelitian berfokus pada permasalahan kemiskinan yang ada di provinsi Indonesia.
- b. Variabel penelitian yaitu ZIS sebagai instrument *Islamic social finance* Pajak, dan Bansos sebagai instrument fiskal dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator secara makro serta IPM sebagai indikator penghubung antara independent dan dependen.
- c. Penelitian ini mengacu pada model analisis jalur untuk menguji variabel independen secara langsung dan tidak langsung melalui IPM terhadap kemiskinan. Serta adanya heterogenitas antar pulau jawa dan luar jawa

penelitian ini melakukan pengujian *Multi-Group Analysis* (MGA) untuk mengidentifikasi perbedaan pengaruh di luar jawa dan pulau jawa.

- d. Data merujuk pada tahun analisis 2020-2024 dengan analisis menggunakan aplikasi Smart-PLS

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada identifikasi dan batasan permasalahan didapatkan beberapa permasalahan, berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh ZIS terhadap kemiskinan di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?
2. Apakah terdapat pengaruh pajak terhadap kemiskinan di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?
3. Apakah terdapat pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?
4. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?
5. Apakah terdapat pengaruh ZIS terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?
6. Apakah terdapat pengaruh Pajak terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?

7. Apakah terdapat pengaruh Bantuan Sosial terhadap indeks pembangunan (IPM) di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?
8. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?
9. Apakah terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?
10. Apakah terdapat pengaruh ZIS terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel intervening di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?
11. Apakah terdapat pengaruh pajak terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel intervening di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?
12. Apakah terdapat pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel intervening di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?
13. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel intervening di provinsi Indonesia, serta apakah terdapat pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan permasalahan diperoleh tujuan penelitian, berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ZIS terhadap kemiskinan di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak terhadap kemiskinan di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ZIS terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.
8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.

9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.
10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ZIS terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel intervening di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.
11. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel intervening di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.
12. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel intervening di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.
13. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel intervening di provinsi Indonesia, serta menguji pengaruh antara pulau jawa dan luar jawa.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan temuan penelitian berkontribusi pada pihak, berikut:

1. Secara Teoritis: diharapkan peneliti ini dapat berkontribusi dalam ruang lingkup ilmu ekonomi, khususnya ekonmi syariah dan ekonomi Pembangunan. Penelitian ini memberikan perspektif komprehensif

mengenai integrasi instrument *Islamic social finance* yaitu ZIS dengan instrument kebijakan fiskal yaitu pajak dan bantuan social dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang ada terkait peran Indeks Pembangunan sebagai variabel intervening yang menjembatani pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kebijakan distributif terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menjadi referensi empiris bagi pengembangan teori maqashid syariah dalam konteks pembanguna ekonomi makro.

2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan berkontribusi, di antaranya;
 - a. Pemerintah: diharapkan menjadi fondasi kajian evaluasi dan pertimbangan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih inklusif sehingga dapat mendorong optimalisasi program memutus mata rantai kemiskinan.
 - b. BAZNAS: diharapkan menjadi rujukan empiris Lembaga filantropi islam mengenai dampak penyaluran dan ZIS terhadap indicator makroekonomi. Hal ini dapat mengoptimalkan strategi penghimpunan dan penyaluran ZIS yang lebih produktif dan terintegrasi dengan program pembangunan pemerintah untuk akselerasi pengentasan kemiskinan di berbagai kemiskinan.
 - c. Akademik: bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris dan bahan pembandingan untuk penelitian penelitian selanjutnya yang sejenis. Secara khusus, penggunaan metode analisis jalur (path analysis) dan Multi-Group Analysis (MGA) dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi metodologis

dalam membedah disparitas ekonomi antarwilayah, sehingga dapat memicu penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai variabel-variabel pengentasan kemiskinan.

- d. Masyarakat: diharapkan dapat mengedukasi dan meningkatkan literasi Masyarakat mengenai urgensi pembayaran pajak dan penunaian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Dengan memahami bahwa partisipasi yang mereka lakukan melalui instrument tersebut memiliki dampak nyata terhadap Pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan, diharapkan kesadaran dan kepatuhan Masyarakat dalam menunaikan kewajiban ZIS dan pajak akan semakin meningkat.

F. Penegasan Variabel

Tujuannya supaya mempermudah pemahaman dan meminimalisir kesalahan dalam penafsiran makna dalam penjelasan istilah variabel pada judul penelitian:

1. Konseptual

- a. Kemiskinan sebuah kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan dan Kesehatan dan tidak dapat memperbaiki keadaan yang dialami menjadi kehidupan yang layak.⁶¹

⁶¹ I Gusti Ayu Purnamawati, *Perekonomian Indonesia*, 1st ed. (Depok: Rajawali Press, 2021), 104, https://www.google.co.id/books/edition/Perekonomian_Indonesia_Rajawali_Pers/HQx3EQAAQB-AJ?hl=id&gbpv=0.

- b. ZIS bagian tertentu dari harta kita yang kita sisihkan dan kita keluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat islam.⁶²
- c. Pajak sebuah iuran yang wajib dibayarkan seseorang atau sekelompok orang untuk negara dengan fungsi mendukung kepentingan umum hingga kepentingan penyelenggaraan negara.⁶³
- d. Bantuan Sosial kebijakan pemerintah yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, seperti bantuan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.⁶⁴
- e. Pertumbuhan Ekonomi proses yang merujuk pada data yang bersifat kuantitatif dan umumnya diukur menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan atau nilai total pasar dari barang-barang produksi dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun.⁶⁵
- f. Indeks Pembangunan Manusia mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan (harapan hidup),

⁶² Guruh Herman Was'an et al., *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Zakat_dan_Wakaf/WzDPEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

⁶³ Mia Amalia et al., *Buku Ajar Pengantar Perpajakan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Pengantar_Perpajakan/MBFPEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

⁶⁴ Joko Purnomo, Ratnaningsih Damayanti, and Juwita Hayyuning Prastiwi, *KEBIJAKAN SOSIAL & PERMASALAHAN SOSIAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK* (Malang: MNC Publishing, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/KEBIJAKAN_SOSIAL_PERMASALAHAN_SOSIAL_PADA/twZMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

⁶⁵ Ari Riswanto et al., *BUKU AJAR PENGANTAR EKONOMI* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_PENGANTAR_EKONOMI/kunoEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

Pendidikan (angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup (pendapatan per kapita).⁶⁶

2. Operasional

Kemiskinan sebagai permasalahan multidimensi yang menjadi sebab individu atau kelompok belum bisa memenuhi kelayakan hidup akibat keterbatasan sumber daya yang dapat membatasi akses dalam mencukupi kebutuhan dasar. Tingginya jumlah kemiskinan sebagai cerminan kondisi pembangunan yang belum merata dan secara struktural masih tinggi kesenjangan antar individu dan wilayah menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan yang diperlukan redistribusi pendapatan dan didukung dengan pertumbuhan secara inklusif mengingat adanya disparitas dan ketidakseimbangan antar wilayah.

Secara operasional penelitian ini berfokus pada analisis hubungan sebab-akibat (asosiatif) yang melibatkan beberapa instrumen seperti ZIS dan Pajak sebagai sumber pendanaan strategis dari sinergitas instrumen fiskal dan filantropi islam yang mengintervensi pada kesejahteraan, kemudian Bantuan Sosial sebagai jaring pengaman langsung bagi penduduk rentan, serta Pertumbuhan Ekonomi yang berperan ekosistem usaha dan lapangan pekerjaan. Namun, pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pengurangan tidak bersifat instan, melainkan dimediasi oleh peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

⁶⁶ Mohammad Yusuf, *Interaksi Kebijakan Moneter Dan Investasi Syariah* (Merdeka Kreasi Group, 2025), https://www.google.co.id/books/edition/Interaksi_kebijakan_moneter_dan_investas/101iEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

Sehingga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi variabel intervening yang menjembatani pengaruh dari instrumen Islami dan Fiskal, serta ekonomi terhadap hasil akhir kesejahteraan. Mengingat adanya ketimpangan struktur ekonomi di Indonesia, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas perbedaan pengaruh wilayah antara pulau jawa dan luar jawa disparitas atas kondisi geografis, sektor unggulan, infrastruktur keuangan dan pemerintahan di beberapa wilayah. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah instrumen ZIS, Pajak, Bansos dan adanya pertumbuhan ekonomi memiliki pola pengaruh yang sama dalam menekan angka kemiskinan di tengah perbedaan karakteristik wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

G. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi urutan penyusunan Tesis sesuai rencana dan pedoman, berikut:⁶⁷

1. Bagian Awal: terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian Inti

Bab I Pendahuluan: menguraikan fenomena penelitian dan urgensi penelitian terkait kemiskinan; identifikasi dan batasan masalah; rumusan masalah; tujuan, hipotesis, dan manfaat penelitian; penegasan istilah dan sistematika penulisan laporan.

Bab II Landasan Teori: uraian Grand teori yang relevan diperoleh terkait kemiskinan, zakat, pajak, bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi dan

⁶⁷ UIN SATU Tulungagung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungung* (Tulungagung: UIN SATU Tulungagung, 2024), 6–10.

indeks pembangunan manusia. Penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dilakukan penelitian ini, serta kerangka berpikir konseptual.

Bab III Metode Penelitian: uraian tentang rancangan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, populasi dan sampel yaitu purposif sampling 34 provinsi, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis dengan *path analysis* dan *Multi-Group Analysis* (MGA) untuk menguji perbedaan pengaruh di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, kemudian analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian: uraian hasil analisis data dilakukan melalui uji deskriptif, uji outer dan uji inner sebagai bagian dari uji path analysis dan *Multi-Group Analysis* (MGA) serta menginterpretasi

Bab V Pembahasan: menguraikan hasil temuan analisis, kemudian dijelaskan dengan argumen dikaitkan teori yang relevan dan didukung penelitian terdahulu terkait faktor yang mempengaruhi Kemiskinan.

Bab VI Penutup: peneliti menyimpulkan dari hasil pembahasan berupa implikasi dari temuan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang ditunjukkan untuk pemerintah, lembaga terkait, dan juga masyarakat.

3. Bagian Akhir: terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, serta daftar riwayat hidup peneliti.